

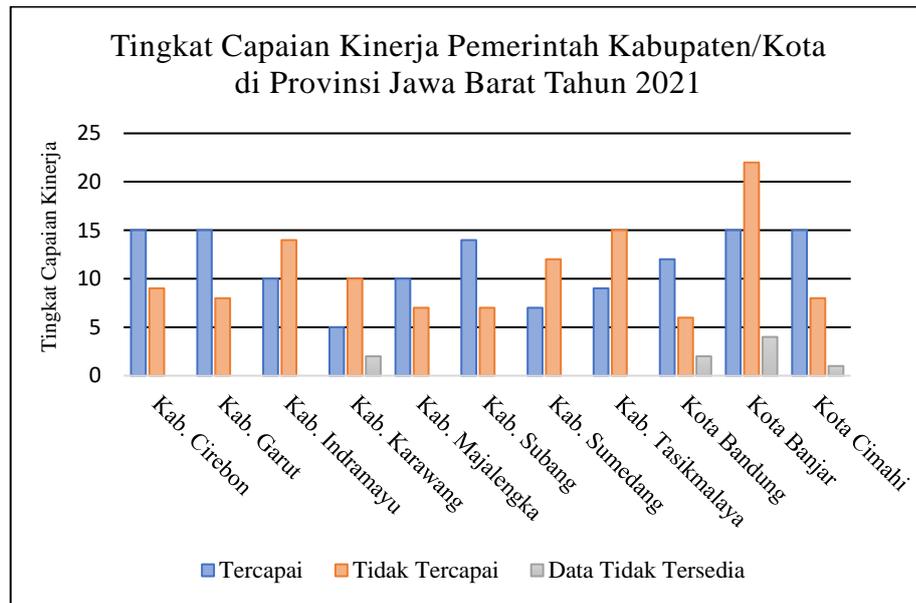
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu tentang kinerja pemerintah daerah saat ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan (Mahsun, 2006).

Tuntutan akan kinerja yang baik selalu terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan terbitnya otonomi daerah dan penetapan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pemerintah. Kinerja pemerintah harus diinformasikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai tingkat pencapaian hasil kerja, yang dikaitkan dengan misi dan visi suatu organisasi. Informasi dilakukan berguna dalam mengambil langkah selanjutnya dengan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan pada program atau kebijakan utama yang akan diambil, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik untuk bahan perencanaan (Damayanti & Hermanto, 2018).



Sumber: LKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Gambar 1. 1
Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan LKIP Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, bahwa tingkat capaian kinerja sesuai target Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar cukup rendah. Berbanding terbalik dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kota Bandung, dan Kota Cimahi dengan tingkat capaian kinerja yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kinerja pemerintah Kabupaten/Kota yang belum maksimal.

Adapun permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintahan daerah adalah BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Kota Bekasi TA 2021. Hal tersebut karena permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi diantaranya adalah

penyalahgunaan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pengenaan ganti rugi tanah yang belum sesuai ketentuan, indikasi penerimaan suap/gratifikasi oleh penyelenggara Negara, pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan gedung teknis yang belum sesuai ketentuan, kekurangan volume pekerjaan, belum memadainya penatausahaan dan pengamanan aset tanah, serta penatausahaan dan pengawasan terhadap kerjasama daerah dengan pihak ketiga atas aset tanah yang belum optimal (BPK, 2022)

Pengukuran kinerja adalah suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah dirancang telah dilaksanakan sesuai dengan rancangan tersebut, dan yang paling penting adalah apakah telah tercapainya keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perancangan. Akuntabilitas publik dan transparansi publik merupakan prinsip yang paling penting untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi ini terlihat pada Kepres No. 7 Tahun 1999 dimana pemerintahan mewajibkan setiap intensif pusat maupun daerah sampai Esselon II untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan pentingnya keterbukaan informasi tentang, kegiatan dan aktivitas Pemerintahan Daerah, diterbitkan juga Undang-Undang No 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi Publik (UU-KIP) tentang Transparansi kegiatan dan aktivitas Pemerintahan Daerah (Laoli, 2019).

Akuntabilitas publik adalah sebuah informasi, pengungkapan aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, jika akuntabilitas dilakukan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah

dapat meningkatkan kinerja pemerintah karena hasil kinerja pemerintah dapat diukur dari pencapaian akuntabilitas. Dalam menghadapi akuntabilitas publik tersebut, pemerintah harus memperhatikan beberapa hal yang penting diantaranya adalah anggaran, pengendalian akuntansi, efektifitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan (Kiri & Handayani, 2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang meliputi: 1) Perencanaan kinerja; 2) Pengukuran kinerja; 3) Evaluasi kinerja; 4) Pelaporan kinerja; dan 5) Capaian kinerja.

Selain akuntabilitas Publik, transparansi juga memiliki peranan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah, karena transparansi memungkinkan masyarakat memahami kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari informasi tingkat kebijakan, dan proses pembuatan serta hasil yang dicapai titik untuk itu, setiap organisasi harus memberikan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, baik itu kepada masyarakat rumah media, kelompok kepentingan serta pihak terkait lainnya sebagai salah satu wujud penerapan prinsip transparansi (Krina, 2003). Ciri-ciri pemerintah yang transparan manajemen yakni adanya aksesibilitas laporan keuangan, terbukanya tanggung jawab dan adanya keterbukaan penyampaian laporan keuangan kepada publik. Sebagai proses komunikasi dan berbagi informasi, media massa menjadi peran yang sangat penting dalam transparansi (Zahra, Lubis, & Harmain, 2023).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian dengan judul “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah” (Novatini, Kusumah, & Vabiani, 2019). Lalu perbedaan dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut: 1) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan data primer. 2) Pada pemilihan tahun pengamatan penelitian yang diteliti. Penelitian

ini menggunakan data tahun 2022. 3) Sampel penelitian ini mengambil sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan antara lain:

1. Bagaimana Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.
2. Bagaimana Transparansi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.
3. Bagaimana Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.
4. Seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.
5. Seberapa besar pengaruh Transparansi terhadap Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah. Adapun tujuan penelitian secara rinci dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan akuntabilitas publik pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan transparansi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Kinerja pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten Tahun 2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna, baik kegunaan secara teoritis dan praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan mengenai penelitian ini dan juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan serta referensi yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah, serta menerapkan pola pikir ilmiah dalam membandingkan teori-teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dengan praktiknya.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi instansi di masa yang akan datang, serta diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan memaksimalkan potensi daerahnya

3. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan yang berguna sebagai referensi serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang memerlukan untuk penelitian lebih lanjut dan mendalam.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Banten tahun 2022. Untuk mendapatkan data mengenai Akuntabilitas Publik, Transparansi, dan Kinerja Pemerintah Daerah penulis menggunakan data sekunder, penulis menggunakan data LAKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), website resmi pemerintah daerah masing-masing, dan data Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya surat ketetapan penelitian hingga selesai.